

MOTIVASI INGGRIS MENDUKUNG REFERENDUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEREBUTAN KEPULAUAN FALKLAND

Oleh :

Brian Rifqi Andinata

(brianrifqiandinata@yahoo.com)

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293
Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This is a Diplomatic study in International Relations which describes about the reason behind Britain's support to the Falkland Islands Referendum. The Falkland Islands sovereignty disputes happened between The Great Britain and Argentina. The Falkland Islanders and Great Britain think that Referendum is the right way of showing the world their opinion about the Sovereignty on the falkland Islands. This research is expected to give comprehension about Great Britains motivation in their support on the Falkland Islands Referendum.

This is Qualitative research which used descriptive methods, and collecting data from books, journals, official publications and relevant websites. This paper used the reallist perspective and Security theory proposed by Barry Buzan

The result of this research shows that the motivation behind the Britain Support on the Falkland Islands referendum is to Respect the Falkland Islanders opinion about the sovereignty over their homeland and protecting their Sovereignty on the Falkland islands and doing their duty or responsibility on the Falkland Island International Affairs and also Maintaining the Islands as their Overseas Teritory.

Key Words: *Great Britain, Argentina, Referendum, Sovereignty*

Pendahuluan

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai percekocan, perselisihan, pertentangan atau situasi ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan di diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya¹. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai Motivasi Inggris dalam mendukung referendum di kepulauan Falkland/Malvinas.

Pasca konflik yang melibatkan baik pihak Argentina maupun pihak Inggris terdapat beberapa dinamika-dinamika atau gelombang yang unik dalam hubungan antara Argentina dan Inggris. Konflik yang dimaksud adalah konflik di kepulauan Falkland atau dalam bahasa latin di panggil dengan sebutan Islas Malvinas yang dapat diartikan sebagai kepulauan Malvinas. Kepulauan Falkland atau Kepulauan malvinas adalah sebuah wilayah di benua amerika bagian selatan yang tepatnya yang terletak 483 km dari daratan Amerika Selatan atau seberang laut Inggris di Samudra Atlantik Selatan yang terdiri dari dua pulau utama, Falkland Timur dan Falkland Barat, serta beberapa pulau kecil. kota terbesar dan sekaligus ibu kota kepulauan Falkland adalah

Stanley yang terletak di Falkland Timur.

Perebutan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Negosiasi atas kedaulatan pulau-pulau terjadi antara Argentina dan Inggris pada 1960-an dan 1970-an, tetapi tidak ada kesepakatan yang pernah dicapai. Pada tahun 1982 junta militer Argentina, yang memerintah Argentina pada saat itu, menyerang dan menduduki pulau-pulau dan memulai Perang Falklands namun pada akhirnya kepulauan Falkland kembali di bawah kendali Inggris. Sejak perang, Argentina terus menyerukan dimulainya kembali perundingan, namun Inggris menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa Kepulauan Falkland memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Upaya pemungutan suara sebenarnya sudah pernah dilakukan pada peringatan 4 tahun semenjak terjadinya Perang falkland. The Falkland Islands Association And The Marplan Institute melakukan upaya polling atau pemugutan suara yang menunjukkan bahwa 96,45% dari keseluruhan penduduk Falkland yang terdaftar berkeinginan untuk tetap berstatus sebagai wilayah Seberang Laut Britania dibawah kekuasaan Inggris . Delapan tahun kemudian tepatnya pada 1994, sebuah polling yang kali ini di coba dilakukan oleh pihak Argentina sempat ditolak oleh

pihak warga kepulauan Falkland namun akhirnya tetap dilakukan dan menghasilkan 87% dari warga kepulauan Falkland tetap berkeinginan berada dibawah kekuasaan Inggris atau Inggris dan juga menolak diskusi lebih lanjut mengenai kedaulatan di daerah mereka. Situasi kembali memanas pada peringatan 30 tahun perang Falkland dan juga dengan adanya keputusan pemerintah Kepulauan Falkland untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah perairan kepulauan Falkland. Hal ini menyebabkan pemerintah Argentina melarang kapal berbendera Falklands dan badan terkait dengan industri minyak Falklands merapat di pelabuhan Argentina .

Pemerintah Argentina juga memulai kampanye diplomatik, menyerukan beberapa kelompok internasional untuk mendukung dimulainya kembali perundingan, mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi seperti Uni Negara Amerika Selatan dan Rio Grup . Pada tahun 2011 Menteri Pertahanan Argentina , Arturo Puricelli , menyatakan bahwa Kepulauan Falkland berisikan “saudara” di pulau mereka sendiri dan mengatakan bahwa pihak Inggris adalah pihak yang cenderung lebih suka merebut daerah kedaulatan negara lain. Hal ini menyebabkan Gubernur Kepulauan Falkland , Nigel Haywood , mengusulkan referendum untuk

melihat apakah pulau ingin tetap di Inggris atau tidak .

Pembahasan

Sistem Politik dan Pemerintahan Inggris/Inggris Raya.

Inggris Raya atau dikenal dengan nama resmi Kerajaan Bersatu Inggris dan Irlandia Utara (bahasa Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau United Kingdom, UK) atau secara umum dikenal sebagai Inggris adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa.

Sebuah negara kepulauan yang terdiri dari Pulau Inggris British Isles, bagian timur laut Pulau Irlandia dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil. Irlandia Utara adalah satu-satunya bagian dari Inggris yang berbagi perbatasan darat dengan negara berdaulat lain, yaitu Republik Irlandia. Selebihnya, perbatasan darat Inggris dikelilingi oleh Samudera Atlantik, Laut Utara, Selat Inggris dan Laut Irlandia.

Luas total dari wilayah Inggris adalah sekitar 243,610 Km². Inggris terletak di antara Samudera Atlantik Utara dan Laut Utara. Pantai tenggaranya berjarak sekitar 35 kilometer dari pantai utara Perancis, yang dipisahkan oleh Selat Inggris.

Inggris terletak di antara 49° sampai 61° lintang utara, dan 9° BB sampai 2° BT. Irlandia Utara berbagi perbatasan darat sepanjang 360 km

dengan Republik Irlandia. Inggris mempunyai garis pantai sepanjang 17,820 kilometer. Negara ini dihubungkan ke benua Eropa oleh Terowongan Channel, terowongan bawah laut sepanjang 50 kilometer di bawah laut). Terowongan ini merupakan terowongan bawah laut terpanjang di dunia.

Inggris merupakan negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia dan terbesar ketiga di Eropa setelah Jerman dan Perancis. HM Treasury yang dikepalai oleh Menteri Keuangan Inggris, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan Pemerintah Inggris.

Bank of England adalah bank sentral Britania yang bertanggung untuk mengeluarkan mata uang negara, yaitu poundsterling. Bank di Skotlandia dan Irlandia Utara tetap diberi hak untuk mengeluarkan uang kertas sendiri, dengan catatan harus tetap menyimpan cadangan uang kertas Bank of England dalam jumlah yang cukup. Poundsterling adalah cadangan mata uang terbesar ketiga di dunia. Keterlibatan Kerajaan dalam ekonomi dilaksanakan oleh Kanselir Perbendaharaan (Chancellor of the Exchequer).

Inggris memiliki batubara, gas alam, dan sumber daya minyak, namun cadangan minyak dan gas alamnya menurun. Inggris telah menjadi importir energi sejak tahun 2005. Sektor jasa Inggris menyumbangkan sekitar 73% dari total PDB. London adalah salah satu dari tiga "pusat

komando" perekonomian global (bersama New York City dan Tokyo), serta menjadi pusat keuangan terbesar di dunia (bersama New York). London juga merupakan kota dengan PDB terbesar di Eropa. Di samping itu, Edinburgh juga menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di Eropa. Sektor pariwisata sangat berperan penting dalam perekonomian Inggris, di mana lebih dari 27 juta wisatawan mengunjungi Inggris pada tahun 2004. Negara ini berada di peringkat keenam dalam tujuan wisata di dunia. Revolusi Industri berawal dari Inggris, yang mula-mula berpusat pada industri tekstil, kemudian diikuti oleh industri berat yang lain seperti pembuatan kapal, pertambangan batubara, dan pembuatan baja. Imperium Britania juga turut menciptakan pasar luar negeri bagi produk-produk Britania, yang memungkinkan Britania untuk mendominasi perdagangan internasional pada abad ke-19. Namun, setelah negara-negara lain juga berindustri, ditambah dengan kemerosotan ekonomi setelah dua perang dunia, Inggris mulai kehilangan keunggulan kompetitifnya. Industri-industri berat mengalami penurunan sepanjang abad ke-20. Meskipun demikian, manufaktur tetap menjadi bagian penting dari perekonomian.

Inggris adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer, dengan London sebagai Ibukotanya. Terdapat empat negara dalam wilayah kedaulatan Inggris yang masing-masingnya berdiri sendiri, yakni:

Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda kekuasaannya dan berpusat di ibu kota masing-masing, yaitu Belfast, Edinburgh, dan Cardiff. Inggris juga memiliki tiga wilayah Dependensi Mahkota, yakni Guernsey, Jersey, dan Pulau Man. Wilayah-wilayah ini terkait, namun secara konstitusional bukanlah bagian dari Inggris. Selain itu, terdapat empat belas wilayah seberang laut Britania. Wilayah-wilayah tersebut merupakan sisa-sisa dari Imperium Britania, yang pada suatu masa pernah menjadi imperium terbesar di dunia yang meliputi hampir seperempat luas total bumi. Pengaruh Inggris (khususnya Inggris) bisa dijumpai di negara-negara bekas koloninya dalam hal penggunaan bahasa, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan budaya .

Inggris adalah salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar keenam di dunia menurut PDB nominal dan terbesar kedelapan di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Inggris juga merupakan negara industri pertama di dunia, dan menjadi penguasa dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hingga saat ini, negara ini tetap menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, budaya, militer, sains, dan politik. Inggris diakui sebagai negara yang memiliki senjata nuklir, dan pengeluaran militernya menempati urutan terbesar keempat di dunia.

Inggris adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1946 dan telah menjadi anggota Uni Eropa serta pendahulunya; Masyarakat Ekonomi Eropa, sejak tahun 1973. Inggris juga merupakan anggota Negara-Negara Persemakmuran, Majelis Eropa, G7, G8, G20, NATO, OECD, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Wilayah Seberang Laut Britania

Wilayah Seberang Laut Britania (British Overseas Territories) terdiri dari empat belas wilayah Inggris yang berada dalam yurisdiksinya walaupun bukan merupakan bagian dari Inggris. Wilayah-wilayah tersebut adalah sisa Imperium Britania yang belum mendapatkan kemerdekaan atau telah memilih untuk tetap menjadi wilayah Britania. Nama "Wilayah Seberang Laut Britania" diperkenalkan oleh Undang-Undang Wilayah Seberang Laut Britania 2002, menggantikan nama Wilayah Dependensi Britania, yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kebangsaan Britania 1981. Sebelum 1981, wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai koloni atau Koloni Mahkota. Wilayah Jersey, Guernsey, dan Pulau Man, walaupun juga berada di bawah kedaulatan Kerajaan Britania, memiliki hubungan konstitusional yang berbeda dengan Inggris, dan diklasifikasikan sebagai Dependensi Mahkota. Wilayah Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota berbeda dengan Negara-Negara Persemakmuran, suatu asosiasi sukarela yang beranggotakan

negara-negara yang memiliki hubungan historis dengan Imperium Britania.

Hubungan Inggris dan Argentina dalam konflik perebutan Kepulauan Falkland

Komite dekolonisasi PBB menetapkan Kepulauan Falkland/Malvinas sebagai kepulauan yang oleh masuk dalam daftar 16 wilayah jajahan. PBB juga menetapkan kepulauan Falkland/Malvinas sebagai non-self governing territory. Hal ini berarti pemerintahan kepulauan Falkland/Malvinas bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan dalam negeri kecuali urusan hubungan luar negeri dan pertahanan. Urusan hubungan luar negeri dan pertahanan kepulauan Falkland/Malvinas merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris sebagai self-governing overseas territory Inggris. Walaupun secara administratif kepulauan ini merupakan bagian dari koloni Inggris, namun Argentina juga ikut mengklaim kepemilikan atas kepulauan Falkland/Malvinas .

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Dinamika dapat diartikan sebagai gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika hubungan Inggris dan Argentina setelah perang di tahun 1982 yang disebut sebagai perang Falkland demi memperebutkan kepulauan Falkland/Malvinas dibagi menjadi beberapa tahap/periode.

Tahap pertama terjadi pada periode 1982-1989, pada periode ini hubungan Argentina dan Inggris berada di tingkatan terburuk dalam hubungan diplomatik bilateral suatu negara. Hal ini ditandai dengan adanya pemutusan atau pembekuan hubungan diplomatik antar negara. Pembekuan hubungan diplomatik ini ditandai dengan ditariknya duta besar kedua negara. Penarikan duta besar ini berlangsung selama 8 tahun dan mengakibatkan berubahnya pola perpolitikan luar negeri Argentina terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepulauan Falkland/Malvinas .

Tahap kedua terjadi selama periode 1989-2003. pada periode ini hubungan diplomatik Inggris-Argentina mengalami perbaikan. Dibawah pimpinan Presiden Carlos Menem, pertemuan kedua negara pasca perang Falkland/Malvinas pertama kali diadakan pada 19 Oktober 1989 di kota Madrid, Spanyol. Pertemuan ini bermaksud untuk merundingkan dan membahas kembali hubungan diplomatik kedua negara yang sempat terputus/dibekukan .

Argentina dan Inggris kemudian sepakat untuk mengeluarkan pernyataan bersama tentang kerangka kedaulatan yang kemudian dikenal dengan *sovereignty umbrella*. *Sovereignty umbrella* merupakan kesepakatan antara Argentina dan Inggris untuk mengesampingkan isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) ketika kedua negara menjalin hubungan bilateralnya yang

berisi 2 hal yakni: Perlindungan posisi kedua negara dalam isu kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas dan Tidak ada tindakan di luar perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menegaskan posisi mereka dalam Kepulauan Falkland/Malvinas .

Sovereignty umbrella bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara Argentina dan Inggris tanpa membawa isu kedaulatan Kepulauan Falkland/malvinas. Hal terpenting di dalam sovereignty umbrella adalah Argentina tidak diperbolehkan menuntut Inggris untuk melakukan diskusi maupun negoisasi tentang kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas.

Selain menghasilkan Sovereignty Umbrella, kedua negara sepakat untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dengan menunjuk duta besar, melanjutkan komunikasi udara dan maritim, menjalin kembali kemitraan dalam sektor ekonomi dan perdagangan serta tidak mengungkit isu perbatasan. Kantor kedutaan di kedua negara pun dib`uka kembali pada 26 Februari 1990. Inggris menunjuk Sir Humphrey Maud untuk menjadi duta besar di Argentina dan Argentina menunjuk Mario Campora untuk menjadi duta besar di Inggris.

Hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris yang membaik dapat dilihat dari banyaknya kesepakatan yang dihasilkan dalam periode 1989-2003. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah Terbentuknya South Atlantic Fisheries Commission (SAFC) pada 28 November 1990.

SAFC merupakan badan bentukan Argentina dan Inggris yang bertujuan mengelola dan melestarikan Sumber daya ikan di kawasan Atlantik Selatan. 27 September 1995 juga telah terjadi kesepakatan tentang perjanjian hidrokarbon antara pemerintah Argentina dan Inggris dengan menetapkan wilayah Barat Daya Atlantik sebagai wilayah kerjasama khusus melalui sebuah komisi bersama yang bertujuan untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon seperti minyak dan gas di kawasan Barat Daya Atlantik. Tidak hanya itu, pada 14 Juli 1999 pemerintah Argentina dan Inggris sepakat untuk membuka kembali layanan penerbangan dari kawasan Amerika Selatan ke Kepulauan Falkland/Malvinas dan pemerintah Argentina juga menyetujui agar masyarakat Argentina bersedia menunjukkan paspor jika hendak memasuki wilayah Kepulauan Falkland/Malvinas .

Hubungan diplomatik Argentina dan Inggris pada tahap ketiga mulai menunjukkan tren negatif. Hubungan diplomatik yang berhasil dibangun dan dipulihkan oleh Carlos Menem dengan berpegang pada sovereignty umbrella tidak bertahan lama. Pada masa pemerintahan Carlos Menem, Argentina melakukan normalisasi hubungan dan mengadakan kerjasama dengan pemerintah Inggris, Argentina juga berusaha untuk menarik perhatian penduduk kepulauan Falkland/Malvinas dengan melakukan pendekatan yang halus seperti

mengadakan dialog terbuka dengan penduduk kepulauan. Namun dibawah pemerintahan Kirchner Argentina mengalami pergeseran kebijakan luar negeri kearah yang lebih Agresif dan cenderung anti-Inggris. Kebijakan Nestor dan Cristina Kirchner membuat hubungan diplomatik Argentina-Inggris kembali memanas. Argentina yang berada di bawah kepemimpinan Néstor Kirchner, pada tahun 2003 menolak mempertahankan keberadaan sovereignty umbrella serta menginginkan Argentina dan Inggris untuk mendiskusikan kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas. Pada tahun 2003, Nestor Kirchner menghentikan izin penerbangan menuju Kepulauan Falkland/Malvinas dengan tujuan memunculkan kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas .

Nestor Kirchner juga mengangkat kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas ke dalam forum-forum internasional seperti Organization of American States (OAS) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Argentina juga merasa bahwa masalah kedaulatan Falkland tidak dapat teratasi hanya dengan menggalang dukungan dari forum-forum regional hingga internasional saja melainkan juga perlu ada upaya co-option. Upaya co-option ini dilakukan oleh Argentina dengan dua cara, pertama dengan mendapatkan resolusi yang mendukung Argentina untuk menuntut Inggris agar mau bernegosiasi kembali dengan Argentina terkait Kepulauan Falkland/Malvinas, kedua dengan tetap

menggunakan forum internasional untuk menggalang dukungan bagi setiap tindakan yang dilakukan Argentina terkait sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas .

Politik luar negeri Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner dalam sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas bertolak belakang dengan politik luar negeri yang diambil oleh era kepemimpinan sebelumnya. Perbedaan politik luar negeri tersebut dikomentari oleh David McCann, seorang akademisi dari Universitas Ulster. Menurut McCann, perbedaan politik luar negeri yang diambil Argentina dikarenakan pada 2002 Argentina mengalami keruntuhan ekonomi sehingga ketika Nestor Kirchner terpilih sebagai presiden pada 2003, Kirchner memfokuskan pada program kebangkitan nasional dan ekonomi. Salah satu program kebangkitan nasional Kirchner adalah dengan memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Falkland/Malvinas dengan melarang perusahaan-perusahaan tambang asing untuk beroperasi di Kepulauan Falkland/Malvina. Pada tahun 2007, Kirchner juga membatalkan secara sepihak perjanjian dengan Inggris untuk berbagi hasil dari minyak yang ditemukan di perairan Kepulauan Falkland/Malvinas .

Pendapat yang berbeda diutarakan Federiko Merke seorang akademisi dari Universitas San Andres di Argentina, Merke melihat perbedaan politik luar negeri yang diambil oleh Argentina dalam sengketa Kepulauan

Falkland/Malvinas disebabkan oleh munculnya dukungan regional oleh Organization of American States (OAS) serta dukungan dari negara-negara tetangga seperti Brazil dan Venezuela yang mendukung Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland/Malvinas. Menguatnya dukungan regional menjadikan pemerintah Argentina optimis bahwa pemerintah Inggris akan setuju untuk melakukan negosiasi ulang terkait masalah Kepulauan Falkland/Malvinas .

Hector Timmerman, Menteri Luar Negeri Argentina pada bulan Maret 2012 dalam pertemuan di Seoul menyatakan bahwa Inggris militerisasi Inggris di Falkland/Malvinas dengan mengirim kapal perang nuklir di kepulauan tersebut telah melanggar perjanjian Tlatelolco (Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapon in Latin America) yang menjamin bahwa Amerika Latin merupakan zona bebas senjata nuklir. Disamping meminta bantuan kepada negara-negara Amerika Latin untuk menuntut Inggris agar bersedia melakukan perundingan, Argentina juga menekan Inggris melalui perekonomian. Argentina merancang tindakan untuk menghambat kegiatan perekonomian di kepulauan Falkland/Malvinas dengan cara melarang investor asing untuk berinvestasi di kepulauan Falkland/Malvinas. Pelemahan perekonomian penduduk Falkland/Malvinas juga dilakukan dengan cara menahan kapal berbendera Falkland/Malvinas yang melintasi wilayah perairan Argentina

dan negara-negara Anggota MERCOSUR .

Upaya lain dari Argentina adalah melakukan menarik dukungan dunia Internasional dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh dan selebritis internasional, tindakan ini dikategorikan sebagai geopolitik tokoh internasional. Dengan bekerja sama dengan tokoh dan selebritis internasional Argentina berupaya untuk membangun opini masyarakat global bahwa kepulauan Falkland/Malvinas adalah wilayah kedaulatana Argentina.

Sean Penn salah satu aktor Hollywood pada saat berkunjung di Argentina tahun 2012 lalu menyatakan mengutuk keras tindakan kolonialisme Inggris di Falkland/Malvinas dan menyerukan agar penduduk kepulauan untuk bersedia mengakui kedaulatan Argentina. Argentina juga meminta dukungan dari Morrissey, penyanyi terkenal asal Inggris untuk mempromosikan hak kedaulatan Argentina atas kepulauan Falkland/Malvinas. Selain selebriti dunia Argentina juga meminta dukungan kepada tokoh-tokoh internasional seperti Paus Fransiskus untuk menghimbau kepada pemerintah Inggris agar bersedia mengadakan perundingan dengan pemerintah Argentina.

Referendum Kepulauan Falkland

Kedaulatan adalah inti dari sebuah kesatuan politik yang disebut negara, negara tidak akan terbentuk tanpa kedaulatan, kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah yang bersifat mutlak dan abadi, yang terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.

Kedaulatan merupakan hak suatu negara untuk mengatur wilayahnya, menurut perjanjian westphalia negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki *obligation* (kewajiban) dan *recognition* (pengakuan).

Kedaulatan negara merupakan akta politik yang menjelaskan konsekuensi legalitas hukum, oleh karena itu, kedaulatan eksternal sebuah negara atau kedaulatan dari sudut pandang hubungan internasional, selalu harus melalui pembahasan politik sebelum menjadi ketentuan hukum.

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka diakui secara tegas oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi tentang penentuan nasib sendiri (*Resolution on Self-Determination*) yang ditetapkan pada tanggal 12 desember 1958. Setelah *Resolution on Self-Determination*, Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan rakyat-rakyat jajahan (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*) yang terbentuk pada 14 desember 1960, juga merupakan bukti bahwa Majelis Umum PBB memang

mengakui hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri ini juga tertulis lebih rinci dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai Hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sesuai dengan Charter Perseikatan bangsa-bangsa (*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among states in accordance with the United Nations Charter*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970 .

Terdapat beberapa kesulitan dalam mengartikan dan memahami apa itu *Self-Determination*. Baik dalam arti maupun apapun yang tercakup didalamnya. Beberapa penulis buku-buku Hukum Internasional menganggap bahwa *Self-Determination* bukanlah suatu hal yang bersifat mutlak. Mereka berpendapat bahwa *Self-Determination* harus dianggap ada hanya pada konteks Masyarakat atau kelompok yang menuntut pelaksanaan hak tersebut. *Self-Determination* berkonotasi pada kebebasan untuk memilih bagi rakyat dengan suatu metode tertentu untuk memastikan kehendak Rakyat. Problematika yang ditemui selanjutnya adalah menentukan masyarakat mana yang merupakan “rakyat”. Hal-hal seperti kesamaan wilayah, kesamaan bahasa dan juga kesamaan tujuan politik merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.

Referendum merupakan suatu penyerahan keputusan dari pemerintah kepada rakyat dengan cara

pemungutan suara. Referendum dapat dilaksanakan oleh sebuah negara jika rakyat merasa pemerintah tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, dalam referendum hanya ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat ya atau tidak .

Referendum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya secara langsung dalam masalah tertentu. Referendum dapat menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan sebuah keputusan, terutama keputusan yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat seperti kemerdekaan, perluasan wilayah dan penyatuan atau pemisahan sebuah wilayah . Pemungutan suara secara nasional mengenai suatu masalah politik merupakan cara yang sering dilakukan oleh banyak negara di dunia, ada dua jenis penyelesaian masalah dengan cara pemungutan suara.

Pada 12 Juni 2012, Pemerintah Kepulauan Falkland/Malvinas yang di wakikan oleh Gavin Short selaku salah satu anggota dewan perwakilan Kepulauan Falkland, mengumumkan akan mengadakan referendum kepulauan Falkland/Malvinas untuk mengetahui pandangan penduduk Falkland/Malvinas mengenai status politik kepulauan Falkland/Malvinas .

”Kami berpikir hati-hati tentang bagaimana menyampaikan pesan yang kuat kepada dunia luar yang mengekspresikan pandangan orang Falklands dengan cara yang jelas, demokratis dan serius. Jadi kami telah memutuskan, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Britania, untuk

mengadakan referendum di Kepulauan Falkland untuk menghilangkan semua keraguan mengenai keinginan kami” .

Pemerintah Falkland/Malvinas mengakui Inggris sebagai negara induk dari kepulauan Falkland/Malvinas, namun Argentina juga mengklaim kedaulatan atas Falkland/Malvinas dan secara aktif menyatakan kedaulatan Argentina atas Falkland/Malvinas melalui forum-forum Internasional, serta meminta Inggris untuk mengadakan perundingan mengenai status Falkland/Malvinas, maka pemerintah Falkland/Malvinas mengadakan referendum untuk memutuskan penduduk Falkland/Malvinas masih bersedia menjadi wilayah seberang lautan Inggris atau tidak.

David Cameron, pada Juni 2012 mengumumkan referendum di Falkland/Malvinas mengenai status politik Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas. Dengan mengadakan referendum yang bertujuan untuk meredakan konflik kedaulatan dengan Argentina. Referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas ditolak oleh pemerintah Argentina. Argentina menyatakan bahwa referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas tidak akan menyelesaikan sengketa wilayah namun justru akan memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara .

Menurut Argentina keinginan penduduk pulau, bukanlah menjadi tujuan utama Argentina, karena

penduduk merupakan penduduk Inggris yang mendiami wilayah kedaulatan Argentina. Sengketa kepulauan hanya dapat diselesaikan jika Inggris bersedia melakukan diskusi bilateral. Pemerintah Inggris mendukung pengumuman Referendum tersebut dan mengizinkan penduduk Falkland/Malvinas untuk menentukan masa depannya sendiri. Menurut Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Inggris mengadakan referendum di kepulauan Falkland/Malvinas sebagai bentuk perhatian Inggris terhadap piagam PBB pasal 1 ayat 2 mengenai tujuan pendirian PBB yang tercantum "To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace." Piagam PBB tersebut menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB wajib memberikan kesempatan kepada warga di wilayahnya untuk memilih kedaulatan untuk wilayahnya .

Menteri Hubungan Luar Negeri Inggris, William Hague mengatakan tujuan Inggris mengadakan referendum di Falkland/Malvinas adalah; "We have always been clear that we believe in the rights of the Falkland/Malvinas people to determine their own futures and to decide on the path they wish to take. It is only right that, in the twenty-first century, these rights are respected" . Inggris percaya hak penduduk Falkland/Malvinas untuk menentukan nasibnya sendiri apakah ingin tetap menjadi bagian dari

wilayah seberang lautan Inggris atau ingin melepaskan diri dari wilayah Inggris .

Pernyataan Perdana Menteri dan Menteri Hubungan Luar Negeri Inggris ini mengaskan bahwa Inggris berdaulat penuh atas kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris tidak akan menerima resolusi penyelesaian konflik lain yang ditawarkan oleh PBB dan Argentina karena akan menciderai kedaulatan Inggris atas kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris hanya bersedia melepas kepulauan Falkland/Malvinas jika penduduk di kepulauan itu, ingin melepaskan diri dari kepulauan Falkland/Malvinas.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron menyatakan bahwa hak yang diterima oleh penduduk Falkland/Malvinas merupakan hak yang sama yang diterima oleh seluruh warga Britania di wilayah Inggris. Selain referendum kepulauan Falkland/Malvinas, pemerintah Inggris juga telah menyetujui permintaan referendum politik yang diajukan oleh warga Skotlandia. Inggris memberikan kesempatan kepada seluruh warganya di wilayah Inggris lainnya jika ingin mengadakan referendum mengenai status kedaulatan politik Inggris .

Proses referendum di Falkland/Malvinas berlangsung selama dua hari pada 10-11 Maret 2013. Inggris mengundang Kanada, Cile, Meksiko, Selandia Baru, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay sebagai pengawas internasional dalam proses referendum. Proses transportasi

logistik referendum telah dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2013, anggota komite referendum bersama pengawas internasional mengantarkan logistik referendum ke tempat pemungutan suara (TPS) di pulau Falkland/Malvinas barat. Kertas suara dan daftar pemilih disimpan dalam amplop bersegel dan ditempatkan dalam kotak suara bersegel untuk memastikan bahwa kertas suara tetap tertutup selama proses transportasi. Logistik referendum tersebut disimpan dalam ruangan terkunci yang hanya dipegang oleh petugas referendum .

Pada tanggal 10 Maret 2013 petugas referendum bersama dengan pengawas internasional mendistribusikan logistik referendum untuk TPS di pulau Falkland/Malvinas Timur dan TPS Mobile (berjalan). distribusi logistik referendum di hari kedua sesuai dengan distribusi logistik di pulau Falkland/Malvinas Barat, khusus TPS berjalan transportasi logistik referendum dikirim ke pulau-pulau terpencil yang berada di sekitar kepulauan Falkland/Malvinas. komite referendum juga menyediakan TPS khusus yang berada di rumah sakit, panti jompo dan penjara.

Dalam referendum ini pemungutan suara dilakukan selama dua hari, 10 dan 11 Maret jejak pendapat dibuka dari pukul 10.00 hingga 18.00. Terdapat empat lokasi TPS tetap, dua di pulau Falkland/Malvinas Timur (Stanley dan Goose Green) dan dua di pulau Falkland/Malvinas Barat (Port Howard dan Fos Bay). Komite referendum

menyediakan 4 TPS berjalan yang terdiri dari 3 TPS berjalan beroperasi di pulau Falkland/Malvinas Timur dan 1 TPS berjalan beroperasi di Falkland/Malvinas Barat. Komite referendum juga menyediakan 1 TPS udara untuk melayani warga yang menetap di pulau-pulau terpencil Falkland/Malvinas.

Pada tanggal 11 Maret, Komite referendum mengadakan pemungutan suara di rumah sakit, panti jompo, dan penjara. proses jejak pendapat di tempat khusus ini dilaksanakan sesuai dengan aturan referendum nomor lima (5). Tempat pemungutan suara di kota Stanley merupakan TPS tersibuk dalam proses referendum karena lebih dari 90% pemilih menetap di kota Stanley hal ini menyebabkan antrean pemilih menumpuk di TPS ini, rata-rata pemilih yang terdaftar di TPS Stanley harus menunggu 30 menit hingga mendapatkan giliran memilih.

Peserta terdaftar referendum yang diadakan di Falkland/Malvinas berjumlah 1.650 namun peserta yang mengikuti proses referendum berjumlah 1.517. Berdasarkan data ini dapat diartikan bahwa sekitar 8% atau 135 orang dinyatakan tidak mau berpartisipasi dalam proses referendum tersebut. Sebagian besar dari 135 orang yang tidak mengikuti proses referendum merupakan warga Falkland/Malvinas yang berada diluar negeri dan tidak memanfaatkan pemilihan melalui jalur pos atau jalu proxy. Dari sekitar 1517 warga yang mengikuti referendum 1513 warga setuju untuk tetap berada dalam

kedaulatan Inggris, 3 warga menolak untuk tetap dibawah pemerintahan Inggris, 1 suara dinyatakan tidak sah dan 3 warga abstain. Referendum kepulauan Falkland/Malvinas menetapkan bahwa warga Falkland/Malvinas masih ingin menjadi wilayah seberang lautan Inggris. Kepedulian penduduk kepulauan Falkland/Malvinas dalam mengikuti proses referendum membuktikan bahwa penduduk kepulauan yang berada di atlantik selatan ini sangat ingin untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik kedaulatan. Sekitar 92% penduduk kepulauan yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Masyarakat Falkland/Malvinas walaupun mendapat tekanan dari Argentina dan beberapa Anggota MERCOSUR tetap mengadakan referendum dengan tujuan menunjukkan keinginan yang kuat dari penduduk kepulauan untuk mendapat pengakuan dari seluruh dunia mengenai keinginan politik mayoritas penduduk kepulauan.

Kesimpulan

Perspektif Realisme memandang negara sebagai aktor utama yang bersifat rasional sehingga semua kebijakan dan tindakannya cenderung hanya untuk demi kepentingan dan keamanan nasional. Inggris dan Argentina merupakan dua negara yang memperebutkan Kedaulatan atas Kepulauan Falkland/Malvinas. Kepulauan Falkland atau disebut juga Kepulauan Malvinas secara Geografis terletak dalam wilayah Amerika

selatan. Kepulauan Falkland/Malvinas lebih tepatnya terletak di wilayah selatan Saudera Atlantik. Kepulauan Falkland/Malvinas merupakan gugusan pulau-pulau yang memiliki dua pulau besar. Kedua Pulau besar tersebut yakni Falkland/Malvinas Barat dan Falkland/Malvinas Timur. Argentina menamakannya Islas Malvinas dalam bahasa Spanyol.

Kepulauan Falkland/Malvinas adalah sebuah wilayah seberang laut Inggris di Samudra Atlantik Selatan. Oleh PBB kepulauan Falkland/Malvinas dikategorikan sebagai non-self governing territory berarti pemerintahan kepulauan Falkland/Malvinas bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan dalam negeri kecuali urusan hubungan luar negeri dan pertahanan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris sebagai self-governing overseas territory Inggris.

Dinamika hubungan Inggris dan Argentina setelah perang di tahun 1982 yang disebut sebagai perang Falkland demi memperebutkan kepulauan falkland/Malvinas dibagi menjadi beberapa tahap/periode. Tahap pertama terjadi pada periode 1982-1989, pada periode ini hubungan Argentina dan Inggris berada di tingkatan terburuk dalam hubungan diplomatik bilateral suatu negara. Tahap kedua terjadi selama periode 1989-2003. pada periode ini hubungan diplomatik Inggris-Argentina mengalami perbaikan. Periode ini banyak terjadi pertemuan-pertemuan merundingkan dan membahas kembali

hubungan diplomatik kedua negara yang sempat terputus/dibekukan.

Hubungan diplomatik Argentina dan Inggris pada tahap ketiga (2003-2011) mulai menunjukkan tren negatif. Hubungan diplomatik yang berhasil dibangun dan dipulihkan oleh Carlos Menem dengan berpegang pada *sovereignty umbrella* tidak bertahan lama. Dibawah pemerintahan Kirchner Argentina mengalami pergeseran kebijakan luar negeri ke arah yang lebih agresif dan cenderung anti-Inggris. Salah satu program kebangkitan nasional Kirchner adalah dengan memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Falkland/Malvinas dan menuntut Pemerintah Inggris untuk kembali berdiskusi dan merundingkan masalah kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas.

Pada 12 Juni 2012, Pemerintah Kepulauan Falkland/Malvinas yang di wakikan oleh Gavin Short selaku salah satu anggota dewan perwakilan Kepulauan Falkland, mengumumkan akan mengadakan referendum kepulauan Falkland/Malvinas untuk mengetahui pandangan penduduk

Falkland/Malvinas mengenai status politik kepulauan Falkland/Malvinas dan keputusan ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

Proses referendum di Falkland/Malvinas berlangsung selama dua hari pada 10-11 Maret 2013. Inggris mengundang Kanada, Chile, Meksiko, Selandia Baru, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay sebagai pengawas internasional dalam proses referendum. Dari sekitar 1517 warga yang mengikuti referendum 1513 warga setuju untuk tetap berada dalam kedaulatan Inggris, 3 warga menolak untuk tetap dibawah pemerintahan Inggris, 1 suara dinyatakan tidak sah dan 3 warga abstain. Referendum kepulauan Falkland/Malvinas menetapkan bahwa warga Falkland/Malvinas masih ingin menjadi wilayah seberang lautan Inggris dan pemerintah Inggris berharap agar Argentina dan negara-negara lain di dunia menghormati hasil dari Referendum ini yang merupakan pilihan dan suara langsung dari penduduk Kepulauan Falkland.

Daftar Pustaka

Jurnal, Research Paper, Artikel Ilmiah

Arief Sofyan. 2013. Pengaruh Referendum Kepulauan Falkland Tahun 2013 Terhadap Hubungan Argentina Dengan Inggris. Muhammadiyah University of Malang.

Falklands open to UN referendum to decide whether Islanders want to remain British di kutip dari <http://en.mercopress.com/2012/03/29/falklands-open-to-un-referendum-to-decide-whether-islanders-want-to-remain-british> di akses pada 14 april 2015

Joshua Goldstein. *International Relations*. Longman: New York. 1999. Hlm. 147.

McCann, David. "Column: The British government is facing separation anxiety," (7 Agustus, 2012) diakses dari (<http://www.thejournal.ie/readme/column-the-british-government-is-facing-separation-anxiety-511315-Jul2012/>)

Countries within a country. Prime Minister's Office. Diakses dari <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.number10.gov.uk/Page823>

Miller, Vaughne. 2012. *Argentina and The Falkland Islands.pdf*

Instrumento que otorgó M. Bougainville para la entrega de las Malvinas diakses dari servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/2deabril/descargas/historia/bouganville.pdf

Buku

Freedman, Lawrence. 2005. *The Official History of the Falklands Campaign, The Origins of the Falklands War, Vol 1*, Abingdon: Routledge, hlm. 6.

Mary Cawell, *The Falkland/Malvinas Story 1952-1982*, Anthony Nelson Limited 1983 diambil dari <http://pdfcast.org/paid/9780904614084>

Vicente Palermo, *In Search of Common Good*, 2011, hal 4

Kon, Daniel. Los Chicos de la Guerra, . 1983. *The Argentine conscripts' own moving accounts of their Falklands War* (English translation). New English Library

Klaus Dodds, 2012. *Stormy waters: Britain, the Falkland/Malvinas*

Islands and UK–Argentine relations, The Chatam House, The Independent Thinking of International Affairs

<https://www.gov.uk/government/>
http://web.archive.org/web/20080312060011/http://www.bankofengland.co.uk/about/more_about.htm

<http://www.falklands.gov.fk/>

<https://www.gov.uk/british-forces-overseas-Falkland/Malvinas-islands-and-ascension-island#more-like-thi>

Dokumen Resmi

UN Resolutions: Resolution of the Decolonisation Committee. 2004

<http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/Falkland/>

Sentinel Security Assessment-South America: Falkland Island. 2010

<http://www.economist.com/node/21551493>

UN Documents on Falkland/Malvinas Islands dispute diakses dari <http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/SAC/UN/UN-LIST.HTM>

Gob. Ar. Guia Del Estado diambil dari <http://www.argentina.gob.ar/pais/57-malvinas-geografia-y-clima.php>

Situs Web

<http://en.mercopress.com/2012/>

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.number10.gov.uk/Page823>

<http://www.mapsofworld.com/united-kingdom/>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html>